

## ANALISIS PROSES MANAJEMEN KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

**Febriani Ratnasari, Budi Puspo Priyadi, Retna Hanani**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, S. H., Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (027)7465407, Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

### ***ABSTRACT***

*This study analyzes the management process of environmental management in Kebumen Regency, focusing on waste management as a primary issue. The research employs a qualitative method to identify strategic steps implemented in waste management. The findings reveal that despite positive developments, such as the implementation of the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle), the establishment of waste banks, and the utilization of biogas at Kaligending landfill, waste management in Kebumen Regency remains suboptimal. Major challenges include the low activity levels of waste banks, inefficiency of 3R TPS (Temporary Waste Processing Sites), budget constraints, and insufficient infrastructure. To address these issues, enhanced inter-agency coordination, adequate budget allocation, and increased public awareness of sustainable environmental management are essential. This study provides strategic recommendations to strengthen sustainable environmental management systems while positioning Kebumen Regency as a model of innovative and effective environmental management.*

**Keywords :** *Kebumen Regency Environment, Maritime and Fisheries Service, Public Management, Waste Management*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini membawa berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Semakin banyaknya penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan, air, energi, dan infrastruktur, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Malihah & Nazairin, 2024).

Gambar Jumlah Penduduk di Indonesia



Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2024

Salah satu faktor penting dalam permasalahan lingkungan, yaitu tingginya jumlah penduduk. Pertumbuhan populasi yang pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini turut menyebabkan bertambahnya volume limbah domestik yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah (Basuki et al., 2020).

Indonesia sebagai negara peringkat empat penduduk terbanyak di dunia mengalami peningkatan produksi sampah yang mengerikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 Indonesia

menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah. Sedangkan tahun 2022 menjadi periode dengan timbulan sampah terbanyak dalam 5 tahun terakhir dengan total mencapai 38,6 juta sampah. Berikut merupakan data timbulan sampah di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

**Tabel Timbulan Sampah Nasional Pada Tahun 2019-2023**

Tahun	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
2019	27.618.317
2020	27.592.603
2021	28.591.323
2022	38.633.706
2023	38.437.064

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Pada Tabel diatas terlihat bahwa terjadi perubahan secara naik turun timbulan sampah yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, data tersebut mengindikasikan bahwa volume sampah yang dihasilkan masih cukup tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Namun, upaya pengelolaan sampah sejauh ini masih kurang optimal demikian, dengan didapatinya permasalahan-

permasalahan mengenai sampah terutama di kota-kota besar.

Namun demikian, proses pengendalian sampah sejauh ini terbilang belum baik dengan didapatinya permasalahan-permasalahan mengenai sampah terutama di kota-kota besar.

**Tabel Provinsi Penghasil Timbulan Sampah Terbesar di Indonesia Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)
1	Jawa Timur	6.117.220
2	Jawa Tengah	5.510.974
3	Jawa Barat	4.279.095
4	DKI Jakarta	3.141.650
5	Sumatra Utara	1.827.494

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai penghasil sampah terbesar kedua di Indonesia, dengan total timbulan sampah mencapai 5,51 ton pada tahun 2023. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampah sebesar 6,11. Provinsi Jawa

Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara secara berurutan menempati posisi ketiga hingga kelima dalam daftar tersebut.

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki potensi wisata yang cukup banyak, salah satunya adalah Pantai Menganti. Pantai Menganti merupakan daya tarik utama bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata, tentunya banyak pendatang lokal maupun domestik yang berdatangan ke Kabupaten Kebumen, maka sudah sepatutnya Kabupaten Kebumen menjadi perwajahan kota dengan terwujudnya Kabupaten Kebumen yang bersih.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kebumen, yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah yang bersih dan sehat. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang efektif.

Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tugas pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen menerima Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena berhasil melakukan pengelolaan lingkungan yang baik setelah penantian 27 tahun. Penghargaan tersebut diterima pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Sebagai Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Adipura, Kabupaten Kebumen dapat dikatakan telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik, yang semestinya

memang memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan penghargaan yang didapat.

Penghargaan Adipura diberikan berdasarkan evaluasi beberapa faktor, seperti evaluasi keberadaan dan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir yang memadai, fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif. Kemudian mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang ada dalam pengelolaan sampah di suatu daerah. Hal ini mencakup aspek legalitas, perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor yang dievaluasi. Ini mencakup program-program edukasi, kampanye kesadaran, dan upaya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian evaluasinya pun mencakup aspek kualitas lingkungan terkait pengelolaan sampah, seperti kebersihan kota, tingkat pencemaran, pengendalian dan pengurangan

limbah, serta upaya mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada kenyataannya, banyak tumpukan sampah di ruas jalan Kabupaten Kebumen menjadi pemandangan yang kurang menyenangkan, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi para wisatawan yang berkunjung. Kondisi ini menciptakan kesan buruk terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Penanganan sampah yang kurang optimal dapat berdampak negatif terhadap citra daerah, serta mengganggu kenyamanan dan kesehatan publik.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kebumen. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat juga semakin besar, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan.

Jika pada kenyataannya pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen masih belum optimal, dapat menjadi pertanyaan mengenai kesesuaian penilaian dengan kondisi aktual pengelolaan sampah di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai **“Analisis Proses Manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan”**.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Situs penelitian terletak di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Subjek penelitian terdiri dari informan dan partisipan yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan

melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Manajemen Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kebumen**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah krusial dalam pengelolaan sampah yang harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencapai efektivitas. Kegiatan perencanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen didasarkan pada kebijakan daerah yang berlaku serta mengacu pada target-target yang terdapat dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Di dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) persampahan Kabupaten Kebumen, dinyatakan bahwa pengelolaan sampah mencakup dua aktivitas utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Target untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Saat ini Dinas

Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen memfokuskan kegiatan perencanaannya untuk mencapai target yang terdapat dalam Jakstrada tersebut.

Terlihat dari target-target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai komitmen jelas terhadap kebijakan yang berlaku dalam konteks ini yaitu Jakstrada. Proses perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen juga telah memiliki dasar melalui penentuan tujuan yang jelas, pengalokasian anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana. Namun, terkait perencanaan ini belum optimal terlihat dari beberapa kendala. Kendala utama, berupa terbatasnya anggaran berdampak pada kondisi sarana dan prasarana yang tidak mendukung operasional secara maksimal. Seperti armada pengangkutan sampah yang mulai mengalami korosi dan berlubang yang berakibat pada kurang optimalnya pengangkutan sampah dalam setiap satuan waktu. Selain itu, dinas terkait harus mencari pendanaan tersendiri bekerja sama

dengan pihak swasta dalam melakukan optimalisasi anggaran untuk kebijakan pengelolaan sampah.

Untuk mencapai target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, diperlukan upaya lebih dalam mengamankan sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat maupun sumber lain. Pengamanan dana dari pemerintah pusat maupun sumber lain mencerminkan salah satu elemen penting dari perencanaan menurut Terry, yaitu pengelolaan sumber daya yang diperlukan. Alokasi sumber pendanaan yang jelas dan terarah memungkinkan pelaksanaan program dapat berjalan optimal, ini menjadi komitmen penuh pada perencanaan pengelolaan sampah.

Tak hanya perencanaan pembentukan kebijakan, perbaikan sistem pemeliharaan sarana prasarana juga penting dalam adanya perencanaan kebijakan. Dengan adanya perencanaan pemeliharaan akan bisa memaksimalkan anggaran juga fasilitas yang sudah ada. Hal ini dapat memperpanjang suatu kebijakan dan mengefisiensi

anggaran untuk kebijakan lain yang lebih krusial untuk dilaksanakan.

## 2. Pengorganisasian

Dalam Pengorganisasian pada Analisis Proses Manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan mencakup sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di bidang pengelolaan sampah. Masalah sampah dan pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengatasi hal tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diatur bahwa baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Kebumen, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan bertanggung jawab sebagai aktor utama dalam perencanaan pengelolaan sampah, dengan

membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Pengelola Air Limbah dan Sampah (PALS) sebagai bagian dari struktur pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk merumuskan regulasi atau aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, terdapat dua bidang yang bertanggung jawab, yaitu Bidang PPKLHPP dan Bidang PPKL, yang berfungsi untuk menetapkan, menyusun, meninjau, serta merencanakan anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah. Sementara itu, UPT PALS berfungsi sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan di lapangan, mulai dari pengangkutan hingga pemrosesan akhir sampah.

Dapat terlihat bahwa pengorganisasian (organizing) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen ini sudah dibedakan pihak yang bertanggung jawab dan tupoksinya dengan terstruktur dan jelas baik untuk perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Hal ini

pun sudah ditetapkan dalam aturan tertulis. Sehingga dalam pengorganisasian ini pemerintah mempunyai alur kebijakan yang jelas. Setiap pihak pun juga mempunyai dasar hukum setiap kebijakan yang akan mereka laksanakan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen.

### 3. Pelaksanaan

Pada penelitian ini, pelaksanaan atau actuating dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen menempatkan semua SDM agar bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakstranas merupakan langkah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang melibatkan semua pihak terkait untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari sumber hingga ke pemrosesan akhir. Dalam jakstranas, tujuan pengelolaan sampah yang

ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur berdasarkan dua kebijakan utama yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut dari program Jakstranas dan untuk mengurangi volume sampah di TPA, Kabupaten Kebumen menyusun Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) yang berfokus pada pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Target Jakstrada untuk tahun 2025 adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen merancang sistem pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R, dengan tujuan mengurangi sampah dari sumbernya secara efektif. Dengan optimalisasi pembangunan TPS 3R yang terintegrasi dengan model bank sampah, diharapkan sampah dapat dikelola dengan maksimal dan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen, tercatat Kabupaten Kebumen telah memiliki 94 Bank Sampah, dengan 78 di antaranya aktif dan sisanya tidak aktif. Selain itu, terdapat 17 TPS 3R, dengan 8 di antaranya aktif dan sisanya tidak aktif. Ketidakaktifan Bank Sampah dan TPS 3R disebabkan oleh belum stabilnya sistem yang ada di kedua program tersebut. Berdasarkan pengalaman, Bank Sampah dan TPS 3R yang aktif memiliki sistem yang kuat dan komitmen yang terus dipelihara, sehingga program tersebut dapat berkembang, baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun dari sisi bisnis, dengan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen berhasil dimanfaatkan menjadi gas metana yang bisa dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat sekitar. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen telah menjalin kerjasama dengan PT. Sucofindo dalam mengoptimalkan

pemanfaatan biogas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaligending. Salah satu inovasi utama dari kolaborasi ini adalah pemanfaatan gas metan yang terbentuk dari tumpukan sampah, yang biasanya dianggap sebagai masalah lingkungan, untuk dijadikan sumber energi alternatif. Gas metana ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti LPG, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen merupakan komponen penting dalam memastikan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. DLHKP Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pengawasan dengan pendekatan yang menyeluruh, meliputi tiga tahapan utama yaitu pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir.

Setiap tahapan ini dirancang untuk memantau setiap aspek pengelolaan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan langsung ke lapangan, baik oleh tim pengawas maupun mandor yang bertugas memantau aktivitas operasional di berbagai lokasi. Mandor pengangkutan bertanggung jawab memastikan proses pengangkutan sampah berjalan lancar, sementara mandor penyapuan mengawasi para petugas penyapu agar tugasnya sesuai dengan standar kebersihan. Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengawasan juga dilakukan untuk menjamin efektivitas pengelolaan akhir sampah. Sistem pengawasan yang diterapkan bersifat bertingkat dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga memungkinkan pemantauan dilakukan secara berlapis untuk mengurangi potensi kelalaian. Namun, sistem ini diakui masih memiliki kelemahan, terutama terkait koordinasi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan, yang sering kali mengakibatkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan (miss) dalam proses pengelolaan. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, DLHKP melakukan evaluasi berkala melalui rapat-rapat evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen, khususnya dalam aspek pengelolaan sampah, menunjukkan adanya perkembangan yang patut diapresiasi, seperti pemanfaatan biogas di TPA Kaligending. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, di balik pencapaian tersebut, berbagai kendala masih menjadi tantangan yang signifikan. Tingkat keaktifan bank sampah yang hanya mencapai 78 dari total 94 unit yang ada, serta ketidakefisienan sebagian besar TPS 3R, menunjukkan bahwa implementasi program pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya

ketersediaan sarana serta prasarana pendukung turut menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang ideal. Di sisi lain, keberhasilan Kabupaten Kebumen meraih penghargaan Adipura mengindikasikan adanya kemajuan dalam tata kelola lingkungan, tetapi keberhasilan ini perlu diperkuat melalui langkah-langkah perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan implementasi program pengelolaan sampah berjalan lebih efektif. Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan efisien. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan kampanye berkelanjutan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab harus terus digencarkan, terutama dengan

melibatkan komunitas lokal, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Pengembangan bank sampah dan TPS 3R juga perlu mendapatkan perhatian khusus dengan mendorong inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas pengelola agar dapat berfungsi secara optimal. Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program harus ditingkatkan dengan menggunakan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Dengan mengintegrasikan strategi ini, Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan lingkungannya secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan prestasi sebagai wilayah yang bersih dan ramah lingkungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, K. H., Rosa, N. M., & Alfin, E. (2020). Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Menata Lingkungan yang Asri, Nyaman, dan Sehat. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4(1), 1–3.
- Insani, N. H., Larasati, E., & Lituhayu, D. (2024). Manajemen

Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. *Jurnal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 1–14.

kabupaten pasaman. *Jom Fisip*, 2(2), 1–10.

Malihah, L., & Nazairin, A. (2024). Sampah Plastik Sachet Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *YUME : Journal of Management*, 7(1), 198–210.

Nigiana, J., Larasati, E., & Widowati, N. (2016). Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang. *Jurnal of Public Policy and Management Review*, 5(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10421/10123>

Yakin, I. H. (2021). Strategi pemerintah daerah kabupaten sumedang dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau untuk meraih penghargaan adipura. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 61–67.

Yunus, M. (2015). Pelaksanaan koordinasi dalam rangka meraih penghargaan adipura di